

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implementasi Kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang

Implementasi kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang yang dilaksanakan di kecamatan Gunung Pati merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh TNI yang berupa program fisik dan program non fisik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah ketika program TMMD secara keseluruhan belum mampu menyelesaikan ataupun memecahkan masalah kemiskinan yang ada di Kota Semarang secara menyeluruh. Pelaksanaan program dengan terbatasnya kuantitas bantuan untuk kegiatan program TMMD membuat percepatan pengentasan kemiskinan sedikit terhambat, selain itu banyak masyarakat kurang mampu yang tidak mendapat bantuan. Selain itu kesiapan masyarakat yang belum seluruhnya siap untuk ikut membantu dan berpartisipasi aktif membantu pelaksanaan program TMMD. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang belum tepat kebijakan dan belum tepat proses.

5.1.2 Faktor – Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan teori George C. Edwards III, mengungkapkan bahwa implementasi dipengaruhi oleh faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Dalam hal ini, faktor yang dianggap sebagai faktor pendukung dalam implementasi kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang, yaitu komunikasi dan disposisi pelaksana.

Hal ini dapat dibuktikan dari transmisi informasi dalam program TMMD kerap dilakukan oleh pelaksana maupun perumus program melalui rapat koordinasi, informasi yang diberikan dapat berupa lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan sampai sasaran dari program TMMD. Kejelasan informasi program TMMD dapat diterima oleh pihak – pihak terkait maupun masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan antara pelaksana program, perumus program, maupun masyarakat selaku sasaran dari program TMMD. Serta konsistensi informasi dengan rutusnya pihak – pihak yang terkait melakukan rapat koordinasi dan pelaksanaan dari program TMMD sudah berjalan sejak bernama ABRI Masuk Desa (AMD) hingga saat ini.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam implementasi implementasi kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang adalah sumber daya dan struktur birokrasi.

Sumber daya merupakan faktor yang menghambat pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia, beban kerja yang lebih berat tetapi tidak diimbangi dengan pegawai yang cukup. Kemudian untuk kualitas pegawai tidak ditunjang dengan kuantitas pegawai yang memadai maka pelaksanaan program TMMD akan terhambat. Kurangnya kurangnya fasilitas untuk melaksanakan program TMMD, serta masih belum tegasnya baik kodim maupun pemerintah untuk memberi teguran kepada masyarakat maupu dinas – dinas pendukung program TMMD..

Kemudian pada faktor struktur birokrasi, pihak pemerintah selama melaksanakan program tersebut tidak mengetahui adanya SOP tertulis hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan program TMMD. Dari kesimpulan diatas dapat dibuat tabel sebagai berikut :

5.2 Saran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap permasalahan mengenai implementasi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang, peneliti dapat memberikan rekomendasi :

1. Pemerintah Kota Semarang dan Kodim 0733 BS/Semarang lebih memahami kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan, sehingga dengan adanya program TMMD harapan masyarakat kurang mampu dapat

terpenuhi dan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. Serta perlunya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya program TMMD agar dapat membangun kembali kemanunggalan antara TNI dengan masyarakat

2. Perlunya peningkatan kuantitas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan program TMMD, selain itu perlunya pemerintah meningkatkan sumber daya finansial agar lebih banyak masyarakat yang kurang mampu dapat menerima bantuan. Serta dibuatnya SOP khusus tentang program TMMD agar pelaksanaan operasional memiliki dasar kedudukan yang jelas.